

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Oktober 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
SUB UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARTIN NURHUSIN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **524119**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.945.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/150 m² di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m²/120 m² di CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Bangunan Seluas 33 m² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Bangunan Seluas 36 m² di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
5. Bangunan Seluas 31 m² di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **126.000.000**

1. MOBIL, FORD FIESTA MICRO,MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2SV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **20.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **275.310.049****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **3.366.310.049****III. HUTANG** Rp. **----**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.366.310.049

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.